AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7433

KONSEP NEGARA SEJAHTERA MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI PANCASILA (STUDI PADA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PROVINSI ACEH)

The Concept of the Welfare State According to Ibn Taymiyyah and Its Relevance to Pancasila Values (Study on the Society and Government of Aceh Province)

Miftah Pahlevi & Muhammad Azrul Amirullah
International Islamic University of Malaysia; Universitas Darussalam Gontor
pahlevimiftah@gmail.com; amirullahazrul15@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 7, 2025	Sep 1, 2025	Sep 13, 2025	Sep 18, 2025

Abstract

The development of the Indonesian nation requires the integration of religious values and state ideology. Ibn Taymiyyah emphasized that a prosperous state must be built upon the principles of justice, trustworthy leadership, and adherence to Islamic law—concepts that resonate with Pancasila, particularly the fourth principle of democracy and the fifth principle of social justice. Aceh, as a region implementing Islamic law, provides an appropriate locus for examining the interconnection between classical Islamic thought and Indonesia's modern ideology. This study aims to analyze Ibn Taymiyyah's concept of a prosperous state and its relevance to Pancasila through a case study of the society and government of Aceh Province. A qualitative descriptive approach was applied using interviews, observations, and documentation conducted between May 14 and July 29, 2025. The findings demonstrate alignment between Ibn Taymiyyah's ideas and Pancasila values, as reflected in the Aceh government's efforts

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

to balance the implementation of Islamic law with national principles. The people of Aceh also perceive prosperity as not only dependent on religious norms but also on economic justice and trustworthy leadership. The study concludes that Ibn Taymiyyah's concept of a prosperous state and Pancasila values can complement one another in building a just and prosperous society grounded in both spiritual and national ideals.

Keywords: Ibn Taymiyyah; Prosperous State; Pancasila; Aceh; Governance

Abstrak: Pembangunan bangsa Indonesia menuntut integrasi antara nilai-nilai agama dan ideologi negara. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa negara sejahtera harus dibangun di atas prinsip keadilan, amanah pemimpin, dan kepatuhan terhadap syariat Islam, konsep yang relevan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 tentang kerakyatan dan sila ke-5 tentang keadilan sosial. Aceh, sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam, menjadi locus yang tepat untuk melihat keterhubungan pemikiran Islam klasik dengan ideologi modern Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan nilai Pancasila melalui studi pada masyarakat dan pemerintahan Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada 14 Mei hingga 29 Juli 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan nilai Pancasila, tercermin dari upaya pemerintah Aceh menyeimbangkan pelaksanaan syariat Islam dengan prinsip kebangsaan. Masyarakat Aceh juga menilai bahwa kesejahteraan tidak hanya bergantung pada norma keagamaan, tetapi juga pada keadilan ekonomi serta kepemimpinan yang amanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah dan nilai Pancasila dapat saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, serta berlandaskan nilai spiritual dan kebangsaan.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah; Negara Sejahtera; Pancasila; Aceh; Pemerintahan

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah gejala kehidupan umat manusia di sepanjang Sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang muali dari terbentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks dizaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara menjadi objek perhatian yang dibahas bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia (Asshiddiqie, 2016). Negara memiliki tanggung jawab atas kedaulatan masyarakat yang tinggal didalamnnya seperti hak hidup, hak bekerja, hak memiliki tampat tinggal dan hak keturunan, negara meiliki peran penting dalam menjaga aspek-aspek tersebut. Menurut salauh satu pakar filsafat hukum Inggris yaitu Jhon Locke menyatakan bahwa hak-hak tersebut wajib ditegakkan oleh pemerintah disebuah negara demi kesejahteraan masyarakat (JH, 2018).

Sejalan dengan tanggung jawab dari sebuah negara tentu didalamnnya terdapat konsep atau sistem yang menghidupkan pola pemerintahan bagi masyarakat ada banyak pakar tata negara yang menjelaskan konsep negara dengan sudut pandang yang berbeda mulai dari aspek pemerintahan, kehidupan masyarakat. Ragam konsep negara yang ada di dunia ini merupakan konsekuensi dari perbedaan paradigma dan metode berpikir dari setiap para ahli di bidang kenegaraan (Nur, 2023). Jadi eksistensinya merupakansistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitasmanusia dalam sebuah wilayah teritorial tertentu Dengan adanya aturan maka sebuah negara bisa melindiungi masyarakat didalamnnya dari faktor eksternal, negara atau pemerintah juga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainnya. Maka dari asepk-asepek tersebut tumbuhlah masyarakat yang Sejahtera (Rizkiyawan Hasan, 2024).

Negara sejahtera merupakan salah satu konsep ideal dalam sistem kenegaraan yang menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta terciptanya tatanan masyarakat yang damai. Dalam sejarah pemikiran Islam, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh yang memberikan pandangan mendalam mengenai bagaimana sebuah negara dapat mewujudkan kesejahteraan warganya. Menurutnya, kesejahteraan negara tidak hanya bergantung pada kekayaan materiil, tetapi juga pada tegaknya keadilan, stabilitas politik, dan moralitas pemimpin serta masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyah sangat relevan untuk dikaji, karena ia menekankan bahwa kekuasaan dan syariat harus berjalan seimbang demi tercapainya kesejahteraan bersama. Di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah negara memiliki dasar ideologi Pancasila yang juga mengandung nilai-nilai kesejahteraan sosial (Mujtahid et al., 2025). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sila kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah (Oktavianto et al., 2023). Maka dari itu, penting dilakukan penelitian yang mendialogkan antara pemikiran klasik Islam dan ideologi bangsa Indonesia.

Provinsi Aceh memiliki posisi yang sangat strategis dalam penelitian ini karena daerah tersebut dikenal sebagai "Serambi Mekkah" dengan ciri khas penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Aceh memiliki otonomi khusus yang memberikan ruang lebih besar dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonominya berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai negara sejahtera dapat dijadikan lensa analisis untuk melihat bagaimana Aceh membangun kesejahteraan masyarakatnya. Konsep seperti keadilan, amanah pemimpin, serta keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat sangat dekat dengan praktik kehidupan masyarakat Aceh.

Namun demikian, dalam implementasinya, Aceh juga tidak lepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Artinya, ada dialektika menarik antara nilai-nilai Islam yang kuat di Aceh dengan nilai universal Pancasila yang berlaku secara nasional. Hal ini menjadikan kajian relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan nilai Pancasila pada masyarakat Aceh semakin signifikan.

Masyarakat Aceh saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan, mulai dari masalah sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan tata kelola pemerintahan. Meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk hidup sejahtera (Ikramatoun, 2017). Salah satu pakar hukum dan politik dalam Islam yaitu Ibnu Taimiyyah juga telah mengulas tentang konsep kesejahteraan, Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama yang paham dalam banyak keilmuan termasuk hukum ketatanegaaan atau *siyasah* beliau mengajarkan konsep pemerintahan berdasrkan nilai Al-Qur'an, hadist sebagai landasan dalam penetapan norma aturan (Sarbini, 2018). Jika ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah, sebuah pemerintahan harus mampu menjamin keadilan dan menghindarkan rakyat dari penindasan, korupsi, serta ketidakadilan sosial. Sementara itu, Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong, persatuan, serta keadilan sosial sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam yang diwakili oleh pemikiran Ibnu Taimiyah mampu berintegrasi dengan Pancasila dalam konteks Aceh. Integrasi ini diharapkan dapat memberikan model ideal bagi tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Penelitian tentang konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan Pancasila di Aceh memiliki urgensi akademik dan praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini akan memperkaya khazanah pemikiran politik Islam dengan mengaitkannya pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini juga dapat membuka ruang dialog antara nilai-nilai keislaman yang universal dengan nilai-nilai kebangsaan yang kontekstual. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Aceh dan masyarakatnya untuk memperkuat sinergi antara penerapan syariat Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan. Jika relevansi keduanya dapat ditemukan, maka diharapkan Aceh mampu menjadi contoh daerah yang berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kombinasi nilai agama dan ideologi bangsa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi

rujukan bagi daerah lain dalam mengelola kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal dan kerangka ideologi nasional. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan sebagai upaya memperkuat pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan membahas konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan nilai Pancasila dengan studi pada masyarakat dan pemerintahan Provinsi Aceh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pemahaman, serta interpretasi pemikiran Ibnu Taimiyah yang dikaitkan dengan implementasi nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintahan Aceh. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, akademisi, pejabat pemerintah Aceh, serta masyarakat yang merasakan langsung kebijakan berbasis syariat Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen pemerintahan, serta arsip yang relevan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan implementasi nilai Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, mulai dari 14 Mei hingga 29 Juli 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah serta praktik pemerintahan di Aceh. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam menemukan pola hubungan antara nilai-nilai Islam dan nilai Pancasila. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan temuan lapangan dan literatur untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Validitas juga diuji dengan melakukan member check kepada informan agar interpretasi

peneliti sesuai dengan realitas (Maulana & Amirullah, 2025). Dengan teknik ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Konsep Negara Sejahtera Menurut Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ibnu Abdu Al-Halim bin Imam Majduddin Abi Al-Barakat Abdu As-salam bin Muhammad bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah Al-Harrani Al Hambali. Lahir pada 10 rabi'ul awal tahun 661 H yang bertepatan dengan 22 januari tahun 1263 M di kota Harran yang berada di tenggara negeri Syam. Dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ulama besar di Syam yang dikenal teguh dalam memegang ajaran Islam yang murni serta berafiliasi kuat dengan mazhab Hanbali. Kakeknya, Abd al-Salam, merupakan seorang ulama terkemuka dan tokoh agama yang berpengaruh di Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa akhir kehidupannya, beliau menetap di Baghdad dan meninggalkan tradisi keilmuan yang mendalam dalam bidang syariat.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan mengenai teori pemerintahan yang dapat di laksanakan atau demi terbentuknya negara yang sejahtera, beliau mengangkat beberapa perihal teroi pemerintahan antara lain sebagai berikut: Pertama, Walayat (kekuasaan dan bagaimana cara pengangkatannya). Dalam kitab karya Ibnu Taimiyah yang berjudul Siyasah Syar"iyah, beliau mengutarakan bahwa suatu kewajiban dari serorang pemimpin sebuah wilayah untuk mengangkat orang paling mahir pada sektor pemerintahan dan layak dia dapati untuk menyandang tugas tersebut. Metodologi untuk mengetahui yang layak dalam penagngkatan, menurut Ibnu Taimiyah ialah ketika Seorang pemimpin yang mencurahkan segenap kemampuannya untuk memperbaiki urusan agama dan keduniaan semampu mungkin adalah tokoh pada zamannya dan juga mujahid yang paling kuat di jalan Allah. Selain itu, pemilihan dilaksanakan dengan menggunkan sistem undian dalam kasus di mana ada dua calon yang memiliki keunggulan dan kekurangan yang seimbang, dan sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling cocok dan layak.

Kedua, sumber hukum, dimana Islam juga mengatur konsep pemerintahan, maka dari itu Ibnu Taimiyah juga menekankan pada konsep hukim Islam yang bersandar pada Al-

Qur'an sebagai kalam *Illahi, Sunnah, Ijma'*, dan *Qiyas* yang digunakan sepanjang masa dan tidak menyimpang. Ketiga, Kedaulatan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorag khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dengan penjelasan berdsarkan Al-Qur'an tentang kepemimpinan, tidak ada lagi perbedaan antara yang dibutuhkan oleh manusia akan pemerintahan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu mendirikan sebuah kekuasaan Islam merupakan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan umat, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasannya otoritas pemerintah dan pemimpin diberikan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dipilih. Pemerintahan dan kepemimpinan menurut beliau sangatlah penting. Keempat, Peran Ulama dan *Umara* (Pemerintah). Syari'at Islam juga telah menjelaskan bahwa manusia yang memiliki pengaruh ada dua yaitu para ulama (orang-orang berilmu) dan umara (para pemimpin), menurut Ibnu Taimiyah Para pemimpin negara-negara Islam harus fokus pada penegakan hukum syari'ah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Para ulama dianggap melakukan dua tugas padai tingkat kekuasaan: menafsirkan dan menegakkan hukum syari'ah serta membangun sistem keadilan. Tanggung jawab para umara adalah menjaga negara Islam dan mendukung pelaksanaan hukum Allah. Menurut Ibn Taimiyah, ulama dan ulama adalah orang-orang yang disebut dalam Qur'an sebagai "*Ulu al-Amr*, atau mereka yang memerintah, pihak yang harus ditaati oleh umat Islam." Selain itu, ia menyatakan bahwa kelompok tersebut terdiri dari individu terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer. Keberanian, kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk berpikir logis.

Kelima, Bentuk Negara. Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan jenis konstitusi negara Islam yang mana. Ketika Ibn Taimiyah menerima keberadaan sebuah negara, dia menggunakan pendekatan analisis sosiologis daripada kepentingan agama. Ibnu Taimiyah menginginkan kepada para ulama dan umara memimpin negara dalam kerja sama untuk menggapai tujuan umum dengan menerapkan hukum-hukum syari'ah. Keenam, Proses Politik. Proses politik yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah mencakup tiga hal yaitu *Ummah* (Badan Politik), *Baiah* (Bentuk Pemilihan), *Syura* (Bentuk Konsultasi). Tiga gagasan tersebut bagi Ibnu Taimiyah sangat lah penting, pertama konsep Ummah merupakan hal terpenting bagi umat muslim karena dapat membentuk ikatan yang kuat dalam mengamalkan agama Islam sehingga peranan Ummah dalam agama Islam adalah membentuk tali solidaritas atau ukhuwah yang tinggi. Kedua, yaitu konsep Baiah yang menjelaskan bahwa pemimpin Negara Islam yang juga merupakan pemimpin masyarakat ialah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui beberapa proses pemilihan yang melibatkan konsultasi

pendahuluan seperti yang tersebut di atas. Kriteria proses menurut beliau terangkum dalam beberapa hal yaitu: (a) memperoleh dukungan dari suara mayoritas orang-orang muslim, (b) mendapatkan dukungan dari unsur-unsur pemmegang kekuasaan dalam ranah masyarakat. Ketiga yaitu konsep *Syura* (Bentuk Konsultasi) yang berisikan tentang musyawarah muafakat guna menyelesaikan permasalahan jikalau dalam pemerintahan terdapat perselisihan diantara kaum muslimin.

Konsep Negara Sejahtera Berdasarkan Pada Masyarakat Dan Pemerintahan Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai negara sejahtera sangat menekankan pada prinsip keadilan, amanah pemimpin, serta kepatuhan terhadap syariat Islam sebagai pondasi utama. Dalam konteks Aceh, prinsip-prinsip tersebut terlihat dari penerapan Qanun Syariat Islam yang menjadi landasan hukum daerah. Pemerintah Aceh berupaya menegakkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang membimbing masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan ekonomi masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan. Secara umum, nilai keadilan yang ditegaskan Ibnu Taimiyah cukup paralel dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian normatif antara pemikiran Islam klasik dan dasar ideologi bangsa.

Dari wawancara dengan seorang tokoh agama di Banda Aceh, diketahui bahwa penerapan nilai keadilan dan amanah pemimpin menjadi perhatian masyarakat. Beliau menyatakan: *"Kalau pemimpin kami adil, insyaAllah masyarakat bisa lebih sejahtera. Tapi jika pemimpin tidak amanah, maka hukum syariat sekalipun akan sulit berjalan dengan baik."* Pernyataan ini menggambarkan pandangan masyarakat bahwa keberhasilan penerapan syariat sangat erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan. Hal ini selaras dengan konsep Ibnu Taimiyah yang menekankan peran pemimpin dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Dengan demikian, peran pemimpin Aceh dalam menyeimbangkan nilai Islam dan nilai Pancasila menjadi faktor penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini mempertegas relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks kontemporer Aceh.

Selain wawancara dengan tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah di Aceh. Seorang pejabat dari Bagian Keagamaan Dinas Syariat

Islam mengatakan: *"Qanun yang diterapkan di Aceh bukan hanya aturan hukum, tapi juga jalan untuk mendidik masyarakat agar hidup sesuai ajaran agama. Kami mencoba agar regulasi syariat tetap sejalan dengan nilai kebangsaan Indonesia."* Kutipan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga keseimbangan antara identitas keislaman Aceh dengan ideologi nasional Pancasila. Upaya ini sesuai dengan gagasan Ibnu Taimiyah bahwa syariat harus mampu menjamin maslahat dan mencegah kemudaratan. Hal ini memperlihatkan adanya sinergi antara aspek religius dan kebangsaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Contoh sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Pelatihan Pengurus Keagamaan Perempuan Daerah Wilayah Aceh Timur

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa pelatihan Pengurus Keagamaan Perempuan di wilayah Aceh Timur merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan peran aktif perempuan dalam bidang keagamaan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pemahaman keislaman, tetapi juga mendorong para pengurus perempuan agar mampu menjadi motor penggerak dalam pembinaan moral, sosial, dan spiritual di tengah masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir kader-kader perempuan yang memiliki kompetensi dalam mengelola organisasi keagamaan, menyampaikan dakwah yang sejuk, serta menguatkan nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan syariat Islam dan budaya lokal Aceh. Selain itu, pelatihan ini juga memperkuat peran perempuan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, dan sejahtera.

Gambar 2. Pembinaan Keagamaan Diklat Provinsi Aceh

Pada gambar 2 tersebut terlibat beberapa pejabat keagamaan yang baru dilantik P3K dilakukan monitoring dan juga panduan dalam mengembangkan amanahnya sehingga nantinya memiliki kemamfaatan yang besar kepada masyarakat dalam membentuk pemerintah sejahtera terutama di wilayah Aceh.

Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat Aceh memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam. Banyak kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang diwarnai dengan nilai-nilai Islami, seperti pengelolaan zakat, kegiatan dakwah, hingga penegakan aturan berpakaian Islami. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat masih mengkritisi kurang meratanya distribusi ekonomi dan rendahnya lapangan kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun norma syariat ditegakkan, aspek kesejahteraan material belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks Pancasila, hal ini menjadi tantangan untuk mengaktualisasikan sila kelima secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, muncul beragam pandangan mengenai penerapan nilai syariat dan Pancasila. Seorang pedagang di Pasar Aceh Besar mengatakan: *"Kami bersyukur ada aturan syariat, tapi yang lebih kami butuhkan adalah perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil. Kalau kami sejahtera, otomatis kami bisa lebih taat dalam beragama."* Pandangan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek normatif syariat, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi. Hal ini selaras dengan konsep Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa kesejahteraan negara harus mencakup dimensi spiritual dan material. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga mendukung pandangan ini

karena menekankan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh menginginkan keseimbangan antara penerapan syariat dan pembangunan ekonomi.

Untuk memperjelas hasil penelitian, berikut ditampilkan tabel yang memuat ringkasan temuan utama dari wawancara dan observasi di lapangan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Wilayah Aceh

Informan	Pandangan Utama	Relevansi dengan Ibnu Taimiyah	Keterkaitan dengan Pancasila
Tokoh Agama	Pentingnya pemimpin adil dan amanah	Sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam	Sesuai sila ke-4 (Kerakyatan) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial)
Pejabat Pemerintah	Qanun syariat sebagai pedoman hidup masyarakat dan sejalan dengan kebangsaan	Menekankan maslahat dan mencegah kemudaratan	Selaras dengan sila ke-3 (Persatuan) dan sila ke-5
Masyarakat Umum	Butuh keseimbangan antara syariat dan kesejahteraan ekonomi	Menekankan pentingnya keseimbangan spiritual-material	Sesuai sila ke-5 (Keadilan Sosial)

Tabel 1 diatas, menunjukkan adanya benang merah yang kuat antara pandangan Ibnu Taimiyah, aspirasi masyarakat Aceh, serta nilai-nilai Pancasila. Hal ini membuktikan relevansi konsep negara sejahtera dalam konteks modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat Aceh dengan tetap mengacu pada nilai Pancasila. Nilai-nilai keadilan, kepemimpinan yang amanah, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi fondasi utama. Pancasila sebagai dasar negara memberikan ruang integrasi yang harmonis antara Islam dan kebangsaan. Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan syariat di Aceh bergantung pada kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan sosial-ekonomi. Dengan demikian, konsep Ibnu Taimiyah dan nilai Pancasila dapat saling melengkapi dalam membangun masyarakat sejahtera. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami hubungan antara pemikiran Islam klasik dan ideologi modern bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep negara sejahtera merupakan salah satu isu penting dalam kajian politik, hukum, dan keagamaan karena berkaitan langsung dengan cita-cita menghadirkan keadilan

dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang negara sejahtera menekankan prinsip keadilan, amanah pemimpin, serta kepatuhan terhadap syariat Islam sebagai pondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara (Ash-Shufi et al., 2021). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, khususnya sila ke-4 mengenai kerakyatan dan sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ahmad Azhar Basyir, 2023). Dalam konteks Provinsi Aceh, yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, kajian ini menjadi sangat penting karena memperlihatkan bagaimana nilai keislaman dapat dipadukan dengan ideologi kebangsaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan mengenai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan nilai Pancasila juga memiliki signifikansi akademis dan praktis, yaitu memberikan pemahaman teoritis sekaligus gambaran empiris mengenai implementasi nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran keislaman, tetapi juga memberi kontribusi dalam upaya membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berkarakter.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai negara sejahtera sangat menekankan keadilan, kepemimpinan yang amanah, dan penerapan syariat Islam sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini terlihat relevan dengan kondisi Aceh yang menerapkan Qanun Syariat Islam sebagai landasan hukum daerah. Hal ini sejalan dengan teori politik Islam klasik yang menyebutkan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial (Junaidi & Saleha, 2021). Keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga ekonomi dan sosial. Dalam konteks Pancasila, nilai tersebut berkorelasi langsung dengan sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Penelitian terdahulu oleh (Marlina & Yunika, 2024) juga menemukan bahwa penerapan hukum berbasis agama di Aceh bertujuan menciptakan keseimbangan moral dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terdapat kesesuaian normatif antara pemikiran Ibnu Taimiyah, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan nilai dasar Pancasila.

Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa amanah pemimpin menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tokoh tersebut menegaskan bahwa keadilan pemimpin akan membawa masyarakat pada kehidupan yang damai, sedangkan pemimpin yang zalim akan menimbulkan kerusakan. Konsep ini identik dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyyah* yang menekankan peran pemimpin sebagai penegak keadilan dan pelindung rakyat. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian (Setyawan et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin

sangat memengaruhi keberhasilan penerapan syariat Islam termasuk sebagaimana di Provinsi Aceh. Dalam konteks Pancasila, hal ini relevan dengan sila keempat tentang musyawarah dan kepemimpinan yang bijak. Dengan demikian, pandangan masyarakat Aceh terhadap pemimpin mencerminkan kesinambungan antara pemikiran Islam klasik dan nilai kebangsaan Indonesia.

Wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah menjaga harmoni antara penerapan syariat dan nilai-nilai kebangsaan. Mereka menegaskan bahwa Qanun Syariat tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai media pendidikan masyarakat agar hidup sesuai dengan nilai agama. Pemikiran ini paralel dengan konsep *maslahah mursalah* yang juga menjadi kerangka berpikir Ibnu Taimiyah dalam merumuskan hukum. Dalam penelitian (Ismail, 2021), dijelaskan bahwa pemerintah Aceh berusaha menyeimbangkan kearifan lokal, nilai Islam, dan sistem nasional Indonesia. Upaya ini juga sejalan dengan sila ketiga Pancasila mengenai persatuan Indonesia, yang menekankan kebersamaan dalam keberagaman. Dengan demikian, pemerintah Aceh berperan sebagai mediator antara norma Islam dan norma kebangsaan. Hal ini semakin menguatkan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Pancasila dalam praktik pemerintahan modern.

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki partisipasi tinggi dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini ditunjukkan dengan praktik zakat, dakwah, serta kepatuhan terhadap aturan berpakaian Islami yang menjadi bagian dari kehidupan sosial. Konsep partisipasi ini sesuai dengan teori *civil society* yang menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan sistem politik (Chandhoke, 2017). Dalam kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, partisipasi masyarakat adalah bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang adil dan amanah. Penelitian (Restela & Narawati, 2017) juga menemukan bahwa masyarakat Aceh memiliki kesadaran tinggi dalam mendukung hukum syariat karena dianggap sebagai identitas kolektif sebagaimana terkait penanaman budaya dan keagamaan. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan material. Oleh karena itu, tantangan Aceh adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai keadilan sosial Pancasila secara lebih komprehensif.

Hasil wawancara dengan masyarakat kecil, seperti pedagang di Pasar Aceh Besar, menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap perhatian pemerintah dalam bidang ekonomi. Mereka menilai bahwa aturan syariat penting, tetapi aspek kesejahteraan ekonomi

menjadi kebutuhan mendasar. Hal ini memperlihatkan adanya dualitas kebutuhan: spiritual dan material. Pemikiran Ibnu Taimiyah mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa keadilan ekonomi adalah bagian dari kesejahteraan negara. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Ismy, 2019), yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi di Aceh menjadi hambatan utama dalam penerapan syariat secara optimal. Dalam konteks Pancasila, tuntutan tersebut bersesuaian dengan sila kelima yang menekankan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Aceh menginginkan keseimbangan yang nyata antara syariat Islam dan pembangunan ekonomi.

Begitupula dari Tabel 1 hasil penelitian memperlihatkan adanya benang merah yang kuat antara tokoh agama, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Tokoh agama menekankan kepemimpinan yang adil, pejabat pemerintah menekankan maslahat melalui qanun, sementara masyarakat umum menekankan keseimbangan antara syariat dan ekonomi. Semua pandangan tersebut bersumber pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Penelitian (Sari, 2016) juga menemukan bahwa implementasi qanun syariat di Aceh hanya akan berhasil jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Nilai Pancasila juga tercermin secara konsisten, mulai dari sila ketiga tentang persatuan hingga sila kelima tentang keadilan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan adanya integrasi harmonis antara pemikiran klasik Islam, kebijakan lokal Aceh, dan nilai kebangsaan Indonesia.

Secara keseluruhan, masyarakat Aceh menunjukkan pemahaman bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari kepatuhan syariat, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi yang adil. Pemikiran ini konsisten dengan teori *welfare state* modern yang menekankan distribusi kesejahteraan secara merata. Dalam Islam, pemikiran Ibnu Taimiyah juga menekankan hal serupa bahwa negara harus menjamin kesejahteraan umat melalui pengelolaan sumber daya yang adil. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Sucipto et al., 2023) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek hukum Islam dan kesejahteraan sosial, termasuk dalam konteks Aceh. Hal ini karena dalam Pancasila, kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama yang diwujudkan melalui keadilan sosial sehingga itu, integrasi nilai Islam dan Pancasila dapat memperkuat visi Aceh sebagai daerah yang sejahtera secara komprehensif.

Kendati demikian, penelitian juga menemukan kendala yang cukup signifikan, yaitu lemahnya birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan

syariat dan pembangunan ekonomi. Ibnu Taimiyah dalam pandangannya menekankan bahwa pemerintahan yang lemah akan mengakibatkan kerusakan dan penderitaan rakyat. Temuan ini relevan dengan teori kelembagaan (Yuda & Kühner, 2023) yang menyebutkan bahwa kelembagaan yang efektif menjadi kunci pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga didukung oleh temuan (Putra & Amran, 2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola pemerintahan di Aceh sering menjadi hambatan utama pembangunan. Dalam perspektif Pancasila, hal ini menuntut implementasi sila keempat yang menekankan musyawarah dan kepemimpinan yang bijaksana. Maka dari itu, penguatan birokrasi menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan negara sejahtera di Aceh.

Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat menjadi temuan penting lain dalam penelitian ini. Masyarakat Aceh menilai bahwa kesejahteraan sejati adalah ketika kehidupan material dan spiritual berjalan harmonis. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang menolak dikotomi antara agama dan kehidupan sosial. Dalam penelitian (Nur Azra et al., 2024), juga ditegaskan bahwa masyarakat Muslim Indonesia cenderung menginginkan keterpaduan antara agama dan pembangunan. Nilai ini sangat selaras dengan Pancasila yang mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral bangsa sekaligus keadilan sosial bagi semua rakyat. Temuan ini menegaskan bahwa konsep welfare state Islam dapat berintegrasi dengan konsep kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, Aceh berpotensi menjadi model integrasi tersebut.

Dari segi partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem negara sejahtera berbasis nilai Islam dan Pancasila. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi politik yang menegaskan bahwa keterlibatan rakyat adalah indikator utama demokrasi (Nie & Wang, 2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah juga mengakui pentingnya dukungan rakyat terhadap kebijakan pemimpin untuk menjaga stabilitas negara. Penelitian sebelumnya oleh (Sari, 2016) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat Aceh dalam mendukung qanun syariat cukup tinggi, meskipun masih dipengaruhi faktor ekonomi. Dalam konteks Pancasila, hal ini menegaskan relevansi sila kedua dan ketiga tentang kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, sehingga dari itu, dukungan rakyat harus terus dipelihara agar Aceh dapat mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila dan praktik pemerintahan di Aceh. Prinsip keadilan, kepemimpinan yang amanah, keseimbangan

spiritual-material, serta keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan. Penelitian ini konsisten dengan temuan akademisi terdahulu yang menegaskan pentingnya integrasi nilai agama dan kebangsaan dalam pembangunan sosial. Dalam kerangka teori *good governance*, hal ini juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud melalui kepemimpinan yang adil, partisipasi masyarakat, dan birokrasi yang efektif. Pancasila memberikan dasar ideologis, sementara pemikiran Ibnu Taimiyah memberi legitimasi religius untuk pencapaian tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan teoretis dan praktis dalam membangun model negara sejahtera di Indonesia, khususnya Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep negara sejahtera menurut Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bingkai syariat Islam. Pandangan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, masyarakat dan pemerintahan Aceh berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang diajarkan Ibnu Taimiyah dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya melalui kebijakan berbasis syariat dan program pembangunan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh menilai penerapan nilai-nilai Islam mampu memperkuat moralitas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan Pancasila. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan implementasi di lapangan, terutama pada aspek ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Meskipun demikian, penerapan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada masyarakat kecil tetap menjadi prioritas sebagaimana diajarkan Ibnu Taimiyah dan ditekankan dalam Pancasila. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan nilai Pancasila terbukti nyata dalam membangun harmoni sosial, politik, dan keagamaan di Aceh. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya negara sejahtera yang adil, bermoral, dan berketuhanan. Dengan demikian, konsep Ibnu Taimiyah tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga aktual dalam mendukung pembangunan bangsa yang berkeadilan dan sejahtera sesuai konteks Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghadirkan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai rujukan dalam memahami konsep negara sejahtera yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi praktis dengan menunjukkan bagaimana masyarakat dan pemerintahan Aceh mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang tetap sejalan dengan Pancasila. Temuan penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa nilai-nilai keislaman dan Pancasila bukanlah sesuatu yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi untuk membangun kesejahteraan bersama. Kontribusi ini juga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut dalam konteks daerah lain di Indonesia, sehingga dapat memperkuat model implementasi nilai agama yang harmonis dengan ideologi nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberi manfaat tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai referensi kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah 1) memperluas kajian dengan melibatkan wilayah lain di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan penerapan nilai keislaman yang berbeda dengan Aceh, sehingga dapat dibandingkan pola integrasi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan nilai Pancasila secara lebih menyeluruh. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, agar dapat mengukur tingkat efektivitas penerapan syariat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif dan terukur. 3) Mengkaji peran generasi muda dan kelompok marginal dalam proses internalisasi nilai syariat dan Pancasila, sehingga gambaran yang dihasilkan lebih komprehensif. 4) Kajian yang lebih fokus pada aspek kebijakan publik dan dampak ekonomi dari penerapan nilai-nilai tersebut juga menjadi penting, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan mampu memperkuat landasan teoritis sekaligus menghadirkan rekomendasi praktis yang relevan untuk masyarakat dan pemerintah Indonesia secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir. (2023). Perbandingan Antara Etika Ibnu Miskawaih dan Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat Wisdom UGM*, *33*, 15. https://doi.org/doi.org/10.22146/jf.30991

Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhlil, F. D. (2021). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *17*(1), 52–68. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Chandhoke, N. (2017). Civil society. *Development in Practice*, *17*(4–5), 607–614. https://doi.org/10.1080/09614520701469658

Ikramatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *11*(1), 1–20. https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261

Ismail, F. (2021). Eksistensi Kebudayaan Islam Aceh Terhadap Keutuhan Budaya Indonesia. *Conference Proceedings - ICIS 2021*, *1*(1), 331. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/icis/article/view/12696

Ismy, W. S. (2019). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Penganan Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Aceh Besar)* [UIN AR-RANIRY]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14704/

JH, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *4*(1), 381. http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67

Junaidi, J., & Saleha, N. U. (2021). Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra. *Syariah*, *9*(1), 3. https://doi.org/10.15575/syh.v9i1.340

Marlina, S., & Yunika, E. F. (2024). HUKUM TRADISIONALYANG BERBASIS AGAMA. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *10*(4), 219. https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.4844

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Maulana, M. L., & Amirullah, M. A. (2025). SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Journal Central Publisher*, *2*(9), 2489–2499. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i9.515

Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). The Concept of Religious Moderation From Sunan Kudus' Perspective and Its Correlation with Islamic Education in The Modern Era. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(1), 103–120. https://doi.org/10.32665/alulya.v10i1.3232

Nie, L., & Wang, H. (2023). Government responsiveness and citizen satisfaction: Evidence from environmental governance. *Governance*, *36*(4), 1125–1146. https://doi.org/10.1111/gove.12723

Nur Azra, D., Annisa Qutrunnadaa, F., Simamora, Y., Dio Wijatmika, R., & Siswajayanthy, F. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 65–69. https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.204

Nur, M. (2023). *Negara Dalam Islam* [Uin Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/view/year/2023.html

Oktavianto, A. W., Asrial, A., & Alirmansyah, A. (2023). Analisis penerapan Profil Pelajar Pancasila pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam mencapai nilai gotong royong di kelas IV sekolah dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 174. http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4151

Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, *29*(2), 192–213. https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819

Restela, R., & Narawati, T. (2017). Tari Rampoe Sebagai Cerminan Karakteristik Masyarakat Aceh. *Panggung*, *27*(2). https://doi.org/10.26742/panggung.v27i2.260

Rizkiyawan Hasan. (2024). *Dynamics of the Concept of Welfare State in Indonesia : 5*(10), 1–19.

Sarbini, M. (2018). Hukum, Negara, and Perspektif Ibnu Taimiyah. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *6*(1), 139. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/issue/view/32

Sari, C. M. A. (2016). Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh. *Jurnal Review Politik*, *6*(1), 18. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.68-89

Setyawan, C. D., Sariyatun, S., & Indrawati, C. D. S. (2022). Pemimpin Ideal dan Karakteristik yang Didambakan dalam Menjawab Tantangan Zaman. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, *5*(1), 96. https://doi.org/10.20961/shes.v5i1.57778

Sucipto, D., Ataillah, M. S., & Ramadani, R. A. (2023). Kajian Literatur: Prinsip Ekonomi Islam–Keseimbangan Antara Spiritualitas Dan Kesejahteraan Materi. *Islamic Education*, *1*(3), 119–123. http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/558

Yuda, T. K., & Kühner, S. (2023). Bringing Indonesia into the global welfare regime debate: A literature review and future research agenda. *Asian Social Work and Policy Review*, *17*(2), 103–114. https://doi.org/10.1111/aswp.12275